

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III mengenai analisis deskriptif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) merupakan sistem informasi yang diciptakan/dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan ditingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada wilayah provinsi, kabupaten dan/atau kota berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Pengoperasian SIADINDA hanya dapat dilakukan oleh bagian yang memiliki akun terotorisasi yaitu bagian bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu serta pembuku.
3. Pada aplikasi SIADINDA dirancang berdasarkan pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Sebuah sistem tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan SIADINDA yaitu efektif dan efisien, adaptif, aman, informatif dan terkonsolidasi, integratif, interoperabilitas dan *multi user*. Sedangkan, kelemahan yang dapat dievaluasi dari SIADINDA adalah Persiapan dalam penerapan SIADINDA yang belum memadai, uji kontrol hubungan antar akun dilakukan secara manual, SIADINDA masih berkembang,

sering terjadi *bugs*, belum semua kebijakan pengelolaan keuangan terakomodasi dan belum ada akses khusus/modul khusus untuk PPK, serta sering mengalami akses yang lambat.

#### 4.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan atas pelaksanaan magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman terhadap Penerapan SIADINDA dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan persiapan yang memadai maka sebaiknya meningkatkan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi SIADINDA. Sehingga hal ini dapat menambah kemampuan pengguna/penginput transaksi keuangan, meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi.
2. Agar modul pada sistem aplikasi lebih sempurna dan dapat mengakomodasi kebijakan pengelolaan keuangan serta kinerja PPK, maka perlu meningkatkan kualitas modul, melengkapi beberapa modul yang belum terintegrasi, memberikan akses khusus/modul khusus bagi PPK sehingga hal ini memudahkan PPK dalam melakukan verifikasi dan pemantauan atas laporan keuangan yang telah disusun dan keseluruhan kinerja pengelolaan keuangan. Selain untuk memudahkan bagi PPK, peningkatan serta penyempurnaan modul akan memudahkan pengguna/penginput transaksi keuangan dalam melakukan *crosscheck* antar akun berdasar pada bukti transaksi yang dicatat.
3. Untuk menghindari adanya gangguan *bugs* dan akses yang lambat sebaiknya dilakukan peningkatan kualitas jaringan karena sistem ini berbasis online maka dukungan jaringan yang mendukung akan sangat berpengaruh pada efektivitas, efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

4. Badan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) melakukan peninjauan kembali, evaluasi dan pengembangan terhadap SIADINDA agar aplikasi SIADINDA semakin baik dan sempurna.
5. Integrasikan SIADINDA dengan sistem akuntansi yang lainnya agar aparatur sipil negara yang melakukan pengelolaan keuangan tidak melakukan dua kali pekerjaan karena harus mencocokkan antar satu sistem dengan sistem lainnya.